

DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA
(Suatu Kajian Peran Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pada Pilkada Bupati
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015)

Oleh:

Renaldo Yacob Garedja¹, T.A.M. Ronny Gosal², Johny P. Lengkong³

Email: renaldotjanu@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini ada suatu fenomena dimana agama direkayasa dan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Agama bahkan dijadikan kendaraan politik demi tercapainya suatu maksud dari kelompok-kelompok tertentu. Agama dipolitisasi sedemikian rupa dan dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Fenomena ini harus kita cermati dan kita sadari agar kita tidak terjebak pada teori konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan status quo. Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi Gereja yang berada di wilayah Maluku Utara, Halmahera dan kepulauan di sekitarnya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah yang menyebabkan Sinode GMIH terlibat pada Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dari hasil wawancara, peneliti dalam hal ini menemukan ada keterlibatan Sinode GMIH pada pilkada bupati kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menemukan bahwa secara kelembagaan BPHS GMIH yang memiliki kekuasaan yang dilembagakan, *authority* (Max Weber) digunakan untuk mendorong umat atau warga jemaat agar lebih menggunakan hak politik secara baik. Kemudian BPHS GMIH yang memiliki otoritas secara formal ini, dengan kondisi Sinode GMIH yang pecah, meinstruksikan warga jemaatnya untuk memilih salah satu kandidat untuk mendapatkan kekuasaan di daerah. Peneliti juga menemukan bahwa Keputusan Strategis yang di ambil oleh Badan Pekerja Sinode GMIH melalui hasil Sidang Majelis Sinode Ke IV tahun 2015 di bacan, ada pesan agar Gereja mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di Maluku Utara, dan BPHS menyampaikan pesan kenabian kepada Pemerintah Provinsi untuk mengubah sikap politik yang sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mendukung kelompok Vak 1 dan GPH.

Kata Kunci: *Dinamika, Keterlibatan, Gereja, Politik*

LOCAL POLITICAL DYNAMICS IN NORTH HALMAHERA REGENCY ELECTION
(A Study on Role the Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera in the
2015 North Halmahera Regent Election)

ABSTRACT

Today there is a phenomenon where religion is engineered and used as a political tool by certain groups. Religion is even used as a political vehicle in order to achieve the goals of certain groups. Religion is politicized in such a way and used as a tool to preserve power. We have to pay close attention to this phenomenon and realize that we are not trapped in a conspiracy theory that was deliberately created to maintain the status quo. The Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) is one of the church organizations located in North Maluku, Halmahera and the surrounding islands. In this case, the researcher wanted to find out what caused the GMIH Synod to be involved in the 2015 Pilkada in North Halmahera Regency. The researcher used a qualitative approach with descriptive elaboration. From the results of interviews, researchers in this case found that there was the involvement of the GMIH Synod in the 2015 elections for the

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat`

² Selaku Pembimbing 1.

³ Selaku Pembimbing 2.

regent of North Halmahera regency. Researchers found that institutionally BPHS GMIH has institutionalized power, authority (Max Weber) is used to encourage people or congregation members to use more political rights well. Then BPHS GMIH which has formal authority, with the condition of the GMIH Synod being broken, instructed the members of its congregation to choose one of the candidates to gain power in the regions. The researcher also found that the strategic decisions taken by the GMIH Synod Worker Body through the results of the 2015 Fourth Synod Council Session in Bacan, there was a message that the Church should prepare candidates for regional leaders in North Maluku, and BPHS conveyed prophetic messages to the Provincial Government to change political attitudes that previously and even now support the Vak 1 and GPH groups.

Keywords: Dynamics, Involvement, Church, Politics

PENDAHULUAN

Dewasa ini ada suatu fenomena dimana agama direkayasa dan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Agama bahkan dijadikan kendaraan politik demi tercapainya suatu maksud dari kelompok-kelompok tertentu. Agama dipolitisasi sedemikian rupa dan dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Fenomena ini harus kita cermati dan kita sadari agar kita tidak terjebak pada teori konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan status quo. Gereja secara internal, merupakan sebuah komunitas spiritual yang menawarkan sebuah proses perubahan kehidupan yang terus menerus menuju kepada kesempurnaan. Ada banyak gesekan yang terjadi di dalamnya, mereka yang bertahan akan semakin disempurnakan menuju kedewasaan rohani. Secara eksternal, gereja memiliki misi untuk membawa nilai-nilai Kerajaan Allah ke dalam dunia ini sehingga karya penyelamatan Yesus Kristus dapat diberitakan melalui kehidupan gereja itu sendiri.

Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi Gereja yang berada di wilayah Maluku Utara, Halmahera dan kepulauan di sekitarnya. GMIH bukanlah perkumpulan orang-orang yang secara etnis dan atau berbudaya Halmahera. Tetapi GMIH adalah gereja yang berkepalakan Tuhan Yesus Kristus dan oleh Tuhan sebagai pendiri dan pemilik GMIH, menempatkan Gereja-Nya itu di pulau Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengemban misi Allah di tengah-tengah dunia. Sehingga syalom Allah dalam pengertian yang luas-luasnya, yakni hidup dalam pembebasan, kelepaan, dan kemerdekaan, benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh kita sebagai umat manusia dan bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia. Hakekat Gereja didasari oleh Kisah Para Rasul 2 : 1 "Turunnya Roh Kudus". Roh Kudus, ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus, yang bersinar dalam wajah gereja, denganewartakan Injil kepada semua makhluk. Dengan pernyataan ini mau dikatakan kepada kita bahwa gereja dalam Kristus adalah tanda dan sarana, saluran rahmat persatuan mesra manusia dengan Allah yang menyelamatkan. Pada saat sekarang ini gereja harus menunaikan tugas perutusan itu yakni supaya semua orang tergabung secara lebih erat melalui berbagai cara, hubungan sosial dan budaya memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus.

Setelah terjadi perpecahan antar jemaat di lingkup Sinode GMIH di tahun 2013 yang merupakan imbas dari proses politik lokal atau pilkada Gubernur Maluku utara, sinode GMIH melaksanakan Sidang Majelis Sinode (SMS) yang ke IV di Babang Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu 18 November 2015 dan dari sidang itu mengeluarkan sebuah surat keputusan Persidangan Majelis Sinode IV GMIH dengan No: 11/Kpts/SMSIV/2015 Tentang pesan dan rekomendasi. Adapun pokok rekomendasi yaitu; pertama, Badan Pengurus Harian Sinode (BPHS) dan Steering Committee Sidang Sinode XXVIII. Kedua, Sikap Politik Gereja. Dan yang ketiga, Sikap Gereja Secara Internal. Pada point yang kedua tentang sikap politik gereja, tertera bilamana yang pertama Gereja perlu mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di Maluku Utara. Kemudian bahwa GMIH harus mendukung pemimpin dengan kriteria sebagai berikut: (1) Berjiwa Nasionalis dan Berintegritas, (2) memiliki pengalaman di pemerintahan dan legislatif, (3) memiliki loyalitas dan hubungan emosional dengan GMIH. Dan pada bulan desember di

tahun 2015 Pilkada Bupati Halmahera Utara, Salah Satu pasangan calon yang bernomor urut 1 (satu) memiliki kedekatan dengan sinode GMIH dan pasangan calon tersebut memenangkan Pilkada Bupati di Halmahera Utara dengan perolehan 30.625 Suara (30,96%) dari total 97.914 Suara sah.

Tentunya hal tersebut menandakan bahwa Sinode GMIH masuk dalam urusan politik lokal pada saat itu. Keterlibatan atau peran Politik Sinode GMIH dalam Pilkada di Halmahera Utara tahun 2015 memerlukan kajian secara objektif dan komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peranan

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pendapat lain di kemukakan oleh Nasution (2005:74) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Lebih lanjut Setyadi (2012:29) berpendapat “peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12) Peranan Pengambilan Keputusan (Decisional Role), dalam peranan Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis, akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

2. Organisasi.

Adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut Robbins dalam Ndraha (2011:235). Menurut Herujito, koordinasi merupakan prinsip organisasi yang tidak bisa diabaikan. Orang sering mengatakan, koordinasi merupakan asas pertama dalam pencapaian tujuan organisasi, sedangkan asas lain adalah asas sub-ordinat. Asas lain itu adalah asas-asas yang memungkinkan koordinasi menjadi efektif. Selanjutnya dapat disebutkan, hampir setiap organisasi sebenarnya selalu mempunyai dua tujuan organisasi:

- a. Tujuan Intern. Tujuan ini selalu bersifat koordinatif.
- b. Tujuan Ekstern. Tujuan ini dapat berupa sesuatu yang sesuai dengan tujuan penggabungan upaya organisasi.

Tujuan ekstern tidak harus terus-menerus sama dalam beberapa lapangan organisasi. Tujuan intern harus bersifat paling pokok dalam segala bentuk organisasi. Tujuan intern ini merupakan efisiensi yang diorganisasikan. Dengan kata lain disebut koordinasi.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Seperti yang diungkap Abdul Asri (Harahap 2005:122), mengatakan bahwa: "Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagai distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin".

4. Dinamika Politik Lokal

Dinamika politik sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah medium-medium birokrasi dan mekanisme perencanaan, penjaringan aspirasi dan sejenisnya.

5. Sejarah Gereja Masehi Injili Di Halmahera.

Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) secara kelembagaan berdiri pada tanggal 6 Juni 1949. Prototipe dari GMIH adalah Gereja Protestan Halmahera yang atas seijin Menseibu Jepang didirikan pada masa-masa Perang Dunia II tahun 1943-1945. Sidang Sinode pertama pada 5-6 Juni 1949 menyepakati perubahan nama Gereja Protestan Halmahera menjadi Gereja Masehi Injili di Halmahera. GMIH saat didirikan anggotanya terdiri dari segala jemaat Kristen di Halmahera dan Morotai hasil penginjilan *Utreche Zending Veereniging* (UZV) yang mendefinisikan dirinya secara teologis sebagai bagian daripada Jemaat Masehi yang kudus dan Am; persekutuan segala orang Mukadas (Peraturan AM GMIH, 1949).

Sidang Sinode pertama akhirnya menetapkan tiga agenda pada tanggal 6 Juni 1969, yaitu: 1), GMIH dideklarasikan sebagai gereja mandiri; 2), pentahbisan Badan Pengurus Sinode (BPS) GMIH; 3), serah terima tanggungjawab pelayanan dari VNZ kepada BPS GMIH yang baru. Dengan pertolongan Tuhan, ketiga agenda itu dapat diselesaikan pada tanggal 6 Juni 1949, dan pada petang hari itu juga dirayakan pendirian GMIH yang terdiri dari segala jemaat Kristen di Halmahera serta pulau-pulau sekelilingnya, jemaat ini terkumpul karena panggilan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang telah disampaikan dengan mulut pemberita-pemberita UZV, yang digerakkan oleh Rohulkudus (Peraturan AM Bab I).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran Sinode GMIH dalam Pilkada halmahera Utara. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Fokus penelitian ini adalah: Apakah yang menyebabkan Sinode GMIH terlibat Dalam Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara 2015? dengan menggunakan Landasan teori yang di kemukakan oleh Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12) Peranan Pengambilan keputusan. Dalam peranan Mintzberg berkesimpulan bahwa Keterlibatan pembagian besar

tugas pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
maka secara otoritas formal yang dimaksud disini adalah para pimpinan Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) GMIH terlibat dalam dinamika politik lokal di daerah Kabupaten Halmahera Utara yaitu Pemilihan Bupati Halmahera Utara di tahun 2015
- b. Sebagai pusat informasi.
Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi. maka para pimpinan sinode GMIH menjadi pusat informasi dari sebuah organisasi Gereja, dalam mengarahkan warga jemaat untuk terlibat dalam Pilkada Bupati Halmahera Tahun 2015.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya. Terry dalam Arun Kumar & Rachana Sharma (2000) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai proses memilih tindakan yang tepat dan efektif dari dua atau lebih alternatif untuk tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini sinode GMIH tentunya sebagai Sebuah organisasi gereja pastinya memiliki keputusan-keputusan strategis demi keberlangsungan roda organisasi Sinode GMIH dan dalam mengarahkan umatnya dalam pilkada bupati Halmahera utara tahun 2015.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah dari Sinode GMIH. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tokoh GMIH (1 Orang)
2. Badan Pengurus SINODE GMIH (3 Orang)
3. Pengamat Politik (1 Orang)
4. Masyarakat/Jemaat GMIH (3 Orang).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan rentetan persoalan atau dinamika politik lokal yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara mengisyaratkan bahwa pendidikan politik di tatanan masyarakat masih sangat lemah dan oleh karena itu masyarakat sangat mudah sekali di polarisasi oleh kepentingan elit politik sehingga berdampak pada kehidupan bermasyarakat maupun sebagai umat yang bergereja. Oleh karena itu, hal ini tentunya berkaitan dengan teori dari Minzberg tentang Peranan Pengambilan Keputusan dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12).

Secara Otoritas formal ditemukan bahwa secara otoritas formal seperti yang dikatakan oleh Minzberg adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya. Artinya bahwa Semua pimpinan BPHS SINODE GMIH memiliki otoritas formal terhadap unit organisasinya, dan mereka menerima status dari otoritas tersebut. Status ini menyebabkan semua pimpinan atau menejer terlibat dalam hubungan antar pribadi dengan bawahan, rekan dan bawahan, yang pada gilirannya mereka memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Melalui otoritas ini, peneliti melihat bahwa secara kelembagaan BPHS GMIH yang memiliki kekuasaan yang dilembagakan, *authority* (Max Weber) digunakan untuk mendorong umat atau warga jemaat agar lebih menggunakan hak politik secara baik. Kemudian BPHS GMIH yang memiliki otoritas secara formal ini, dengan kondisi Sinode GMIH yang pecah, meinstruksikan warga jemaatnya untuk memilih salah satu kandidat untuk mendapatkan kekuasaan di daerah.

Dengan harapan, kedepan pemimpin daerah tau memposisikan diri. Gereja Bahkan telah mempersiapkan kader atau kandidat Kristen. Hal itu terkandung dalam tiga misi: merebut kekuasaan, reformasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Dengan proses inilah BPHS beranggapan bahwa merebut kekuasaan di daerah adalah langkah yang mulia untuk

memberitahukan bahwa gereja akan bertindak dan berperan jika kekuasaan itu digunakan dengan sewenang-wenang sehingga telah menimbulkan kekacauan di daerah Halmahera utara.

Dalam konteks keterpilihan politik pada salah satu kandidat bupati, ternyata sudah ada pimpinan jemaat dan majelis yang cenderung memilih kandidat FM dan mereka meneruskan sampai ke posisi paling di bawah (masyarakat/warga gereja). Kecenderungan ini terjadi dikarenakan Sinode GMIH telah menyiapkan kader Kristen untuk menjadi kandidat di pilkada Bupati Halmahera Utara tahun 2015.

Sebagai Pusat Informasi, Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) GMIH berperan aktif secara perorangan dalam memberikan informasi untuk mengarahkan warga jemaat untuk terlibat dalam Pilkada Bupati Halmahera Utara tahun 2015. Dan selain BPHS GMIH, politisi Kristen yang berasal dari kubuh GMIH yang lama memiliki peran besar karena pada saat itu kondisi gereja sangat kacau. Hal ini juga sangat mempengaruhi dalam memenangkan salah satu kandidat bupati pada Pilkada Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2015, yaitu FM.

Sebagai pusat informasi dalam mengarahkan warga jemaat, BPHS GMIH kurang memberikan pendidikan kebudayaan. Hal ini mengalami kemerosotan nilai dalam kehidupan berbudaya. Serta masih tingginya fanatisme agama dalam pemilihan kepala daerah. Tingginya sikap pragmatisme pada warga jemaat adalah bagian dari tanggung jawab moral dari BPHS GMIH dalam mendewasakan warganya melalui beberapa program jangka panjang yang ada, serta melalui struktur organisasi yang ada.

Dalam proses mengelola informasi dalam sebuah organisasi Gereja dalam hal ini Sinode GMIH, sudah berjalan sangat massif sehingga dalam mengarahkan warga jemaat di pilkada bupati tahun 2015 FM mencapai kemenangan yang mutlak dan bahkan terhindar dari *Chaos* antar umat beragama maupun linkup Sinode GMIH. Proses mengelola dan memberikan informasi ini dilancarkan melalui kerja sama antar *Stake Holder* yang memiliki satu Visi yang sama.

Dalam hal keputusan-keputusan strategis didapati bahwa Keputusan Strategis yang di ambil oleh Badan Pengurus Sinode GMIH melalui hasil Sidang Majelis Sinode Ke IV tahun 2015 di Bacan, ada pesan agar Gereja mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di Maluku Utara, dan BPHS menyampaikan pesan kenabian kepada Pemerintah Provinsi untuk mengubah sikap politik yang sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mendukung kelompok Vak 1 dan GPH. Gereja juga merekomendasikan GMIH harus mendukung pemimpin dengan kriteria: 1) Berjiwa Nasionalis, 2) Memiliki pengalaman di Pemerintahan dan Legislatif, 3) Memiliki loyalitas dan hubungan emosional dengan GMIH. Selanjutnya BPHS mengeluarkan Surat Pengembalaan, dan BPHS segera membuat surat Pastoral kepada pemerintah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Dalam pengambilan keputusan strategis, BPHS GMIH juga mengeluarkan surat himbauan-himbauan yang selalu fokus mengusung semangat, dan pesan-pesan yang sempit di sebut dalam keputusan persidangan, sekaligus di dalamnya ada motto yang selalu kami ucapkan: sehati, sepikir, dan segerakan itu selalu menjadi semangat utama. Untuk mengarahkan umat agar sesuai motto tersebut, surat-surat yang dikeluarkan hampir dibuat secara bertahap. Misalnya surat pastoral atau himbauannya seminggu sekali atau sebulan sekali akan disusul lagi, itu teknis-teknis yang dilakukan secara rutin dilakukan sampai dengan tahapan pemungutan suara. Lebih lagi, dalam perkunjungan akhir tahun 2015 (tradisi gereja) para majelis jemaat secara dari rumah ke rumah mengunjungi warga jemaat guna mengadakan kebaktian di rumah warga jemaat. Ketika majelis masuk ke dalam rumah, hal pertama yang ditanyakan ialah mau pilih siapa. Seperti menjadi agenda rutin. Maka sebelum pemilihan BPHS GMIH sudah mengetahui siapa yang akan memenangkan pertarungan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa keterlibatan Sinode GMIH dalam Pilkada Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 dilakukan secara otoritas formal Sinode GMIH yaitu dengan mendorong umat atau warga jemaat untuk menggunakan hak politik dengan baik. Serta peran besar tokoh politik Kristen untuk mendorong pilihan warga jemaat pada salah satu kandidat di Pilkada Bupati kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Gereja juga ingin

melawan intervensi Pemda Kabupaten Halmahera Utara periode 2010-2015 yang diketahui adalah otak dari tim pembaharuan GMIH.

Selain itu, sebagai pusat informasi Badan Pengurus Sinode GMIH berperan aktif dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Akan tetapi Gereja maupun warga jemaat harus objektif. Sebagai pusat informasi, warga jemaat mengalami kemerosotan nilai dalam kehidupan dalam berbudaya. Serta fanatisme agama (primordialisme) masyarakat dalam pemilihan kepala daerah masih tinggi.

Disamping itu keterlibatan GMIH terlihat dari Keputusan Strategis yang di ambil oleh Badan Pengurus Sinode GMIH melalui hasil Sidang Majelis Sinode Ke IV tahun 2015 di Bacan, Halmahera Selatan. Hasil SMS: Pesan, agar Gereja mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di Maluku Utara, dan BPHS menyampaikan pesan kenabian kepada Pemerintah Provinsi untuk mengubah sikap politik yang sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mendukung kelompok Vak 1 dan GPH. Gereja juga merekomendasikan GMIH harus mendukung pemimpin dengan kriteria: 1) Berjiwa Nasionalis, 2) Memiliki pengalaman di Pemerintahan dan Legislatif, 3) Memiliki loyalitas dan hubungan emosional dengan GMIH. Selanjutnya BPHS mengeluarkan Surat Pengembalaan, dan BPHS segera membuat surat Pastoral kepada pemerintah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap. (2005). *Manajemen Dan Resolusi Konflik*. Pustaka Cidesindo Jakarta.
- Miftah Thoha. (2012). *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, elly M.(2008), *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Siswanto,(2012). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta Bumi: Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie (2012). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Titik Triwulan Tutik (2010) *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta, Prenada Media Group
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenada Media Group
- Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 208
- Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya hlm 4-5
- Sumber: Allah Sang Arsitek Gereja, Majalah Salvaton, (Pdt. Arif Multi, Mdiv, Mei-Agustus 2005)
- Moleong, L. J. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- M.Th. Magany ; penyunting, Ruddy Tindage dan Rainy M. P. Hutabarat, *Bahtera Injil di Halmahera*, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara : BUMG-GMIH bekerja sama dengan Institut Hendrik van Dijken, 2012.
- Slamet Santoso. (2004:5), *Dinamika Kelompok*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sumber-sumber lainnya

<https://pilkada2015.kpu.go.id/halutkab>